

Available online at : <http://jurnal.lutu.ac.id/jppolicy>

## Jurnal Public Policy

| ISSN (Print) 2477-5738 | ISSN (Online) 2502-0528 |



# Elemen Sukses Penerapan *Dynamic Governance* di Provinsi Jawa Barat

Martoyo, Nahot Tua Parlindungan Sihaloho

Universitas Tanjungpura, Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Kota Pontianak, 78124, Indonesia

### ARTICLE INFORMATION

Received: January 27, 2021  
 Revised: February 16, 2021  
 Accepted: April 14, 2021  
 Available online: April 17, 2021

### KEYWORDS

Dynamic Governance; Digital Governance; Creative Funding; Pentahelix Collaboration

### CORRESPONDENCE

Phone: 08117570340  
 E-mail: [nahotsihaloho@fisip.untan.ac.id](mailto:nahotsihaloho@fisip.untan.ac.id)

### A B S T R A C T

The aims of the research was to explore and analyze the variables that determine the success of implementing dynamic governance in West Java. This research was conducted qualitatively using a literature review research design. The data obtained were then analyzed following the steps of qualitative data analysis by Miles, Huberman & Saldana. The results of this study reveal that there are at least four elements that contribute significantly to the success of dynamic governance in West Java, namely the typical pentahelix collaboration, creative funding, digital government, and the Jabar Open Data program. The implication of the the research confirms two things. First, program forms in dynamic governance are based on problems in the local environment, so that each region has a different type of program. It's just that in principle the program must be adaptive and accommodating. Second, the design of dynamic governance is the most reliable design for the needs and conditions of the people of West Java today. It could be that the design of agile governance will be adopted by the West Java Provincial Government when dynamic governance is deemed irrelevant and unsolvable.

### PENDAHULUAN

Pada prinsipnya, konsep tata kelola pemerintahan apapun yang diadopsi pemerintah Indonesia pasti dilandasi penolakan terhadap otoritarianisme, korupsi, kolusi, dan tindakan lain yang juga merugikan pemerintah dan masyarakat. Konsep-konsep tersebut didesain tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan untuk merespon masalah-masalah publik. Akan tetapi sedikitnya ada tiga konsep pemerintahan terbaik yang bisa dipilih oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ketiganya adalah *sound governance*, *dynamic governance*, dan *open governance* (Andhika, 2017).

*Sound governance* atau manajemen pola pemerintahan yang baik adalah salah satu konsep *good governance*, yang digunakan untuk mengkarakterisasi tata kelola dengan kualitas unggul dalam hal fungsi, struktur, proses, nilai, dimensi, serta unsur-unsur yang diperlukan di administrasi publik dan pemerintahan (Farazmand, 2004). Selanjutnya, Farazmand juga menegaskan bahwa kunci keberhasilan dari *sound governance* adalah inovasi-inovasi kebijakan. Sedangkan *dynamic governance* atau pemerintahan yang dinamis adalah merupakan konsep pemerintahan yang memungkinkan pemerintah beserta kebijakannya untuk sanggup menyesuaikan diri dengan situasi yang tidak menentu dan berbagai perubahan. Gunanya ialah agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tetap relevan dan efektif untuk tujuan jangka panjang dan menengah. Bagi Neo & Chen (2007), tata kelola yang berlaku di dalam *dynamic governance* merupakan kunci keberhasilan, utamanya di dunia yang terus menerus mengalami akselerasi perkembangan teknologi dan globalisasi. Dinamisme itu ditandai oleh ide-ide baru, anggapan-anggapan baru, *continous improvement*, pengambilan keputusan yang sangat cepat, penyesuaian diri

yang sangat dinamis dan fleksibel, dan inovasi-inovasi baru yang kreatif dan solutif. Oleh karena itu, dalam penerapan *dynamic governance*, akan tercipta kebijakan-kebijakan yang adaptif untuk dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini dari lingkungan pemerintahan (Andhika, 2017).

Kebijakan adaptif semacam ini sebenarnya lebih banyak merujuk kepada konsep yang ditawarkan oleh Gilardi (2016), hanya saja Neo & Chen (2007) sudah lebih dulu merinci dan mengoperasionalkannya. Menurut mereka, *dynamic governance* adalah budaya pemerintahan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Ia ditunjukkan dengan adanya tiga indikator, yaitu kapabilitas dinamis (*dynamic capabilities*), orientasi pemikiran ke depan (*thinking ahead*), kemampuan memikirkan ulang (*thinking again*). Di samping itu, (Neo & Chen (2007) juga menegaskan adanya faktor-faktor utama yang bisa mengembangkan *dynamic governance* secara baik, yakni kelompok orang-orang yang terampil (*able people*) terdiri atas manusia-manusia yang cerdas, tangkas, dan responseif (*agile people*). Akan tetapi, mereka juga memperingatkan bahwa faktor yang kerap mendapatkan perhatian serius adalah faktor lingkungan. Sebab, faktor tersebut berhubungan langsung dengan masalah-masalah keamanan, kemiskinan, dan politik, yang mana aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian.

Berbeda dengan *sound governance* dan *dynamic governance* yang telah banyak di kenal sejak lama, *open governance* baru banyak dikenali dunia beberapa saat pasca *Memorandum on transparency and open government* selama masa pemerintahan Barrack Obama di AS pada 2009, yang kemudian diikuti oleh pemerintah Inggris melalui peluncuran *data.gov.uk* pada 2010. Sejak saat itu, konsep ini menyebar dan banyak dikembangkan di berbagai negara di

dunia (Andhika, 2017). Wirtz & Birkmeyer (2015) kemudian merumuskan *open governance* secara definitif, sebagai proses multilateral, politik dan sosial, yang mencakup tindakan transparan, kolaboratif dan partisipatif khusus oleh pemerintah dan administrasi. *Open government* itu, di Indonesia, sudah didukung oleh pemerintah melalui dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada prinsipnya, masing-masing tiga model pemerintahan yang tersebut di atas memiliki keunggulan dan kelemahan. Namun dapat ditegaskan bahwa efektivitas desain pemerintahan bergantung pada tipe masalah yang dihadapi oleh pemerintah, sekaligus bergantung pada dukungan dan tipikal respon masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia masih berusaha untuk menerapkan *dynamic governance* secara merata meskipun dunia telah mengenal *agile governance* sebagai paradigma baru dalam pemerintahan untuk menghadapi revolusi industri 4.0 (Wasistiono & Anggraini, 2019).

Bagi Indonesia dalam konteks kekinian, kecenderungan pemerintah menggunakan desain *dynamic governance* telah tampak sejak Juli 2019. Ini ditandai ketika beberapa pihak menyarankan agar presiden mulai mempertimbangkan desain *dynamic governance* dalam periode kedua ini, agar pemerintah mampu beradaptasi dengan kondisi perubahan yang serba tidak pasti (dinamis). Oleh karena itu, prioritas dalam perumusan kebijakan publik adalah pola-pola *adaptive policy* melalui jalur *adaptive path* (Triyoga, 2020). Pemerintah sebagai pembuat kebijakan menjalankan *thinking ahead, thinking again, dan thinking across* secara rinci, runtut, dan konsisten (Rahmatunnisa, 2019).

Hal-hal demikianlah yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat. Guna beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat sekaligus mengimbangi perkembangan zaman, Pemprov Jabar mengagas beberapa inovasi, termasuk penerapan konsep *Pentahelix* dan pelaksanaan program Desa Digital (Jabarprov.go.id, 2019b). Hasilnya, menurut survei persepsi maladministrasi tahun 2018, Provinsi Jawa Barat meraih peringkat kedua setelah NTT dalam hal kualitas pelayanan publik. Ini jauh lebih baik daripada Sumatera Utara, Jakarta, Jambi, dan lima provinsi lainnya yang disurvei (Jabarprov.go.id, 2019a).

Pemprov Jawa Barat, dalam hal ini, mampu menjalankan pemerintahan 3.0 yang berbasis pada dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi. Model ini jauh lebih maju daripada model pemerintahan berbasis performa (*performance based buerucaracy*) maupun pemerintahan berbasis aturan (*rule based buerucaracy*). Menurut rencana jangka panjang untuk birokrasi Indonesia, memang *dynamic governance* seharusnya dicapai pada 2025 (Pajri & Asmorowati, 2019), tetapi Pemrov Jabar menunjukkan persiapan, pelaksanaan, dan keberhasilan lebih dini dalam menyelenggarakan *dynamic governance*.

Selain fakta-fakta di atas, beberapa penelitian juga mengkonfirmasi adanya perkembangan pesat dalam pelayanan publik ketika pemerintah daerah menjalankan *dynamic governance*. Beberapa penelitian itu ialah penelitian Hidayat et al. (2019) tentang pengembangan perkampungan budaya Betawi sebagai wisata halal, penelitian Sururii et al. (2019) tentang implementasi program pembangunan rumah tidak layak huni, dan penelitian Piening (2013) tentang kemampuan adaptasi instansi pelayanan masyarakat.

Meninjau efektivitas dari diterapkannya *dynamic governance* di Jawa Barat, baik secara teoretis maupun empiris di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengelaborasi mekanisme pelaksanaan *dynamic governance* di Jawa Barat. Terlebih lagi, penelitian (Fauzi & Iryana, 2017) menunjukkan bahwa budaya organisasi yang belum berubah menjadikan *dynamic governance* di Jawa Barat menjadi terhambat, sehingga *dynamic governance* di Jawa Barat masih memperbaiki aspek teknis (tidak/belum memperbaiki aspek ideologis).

Penelitian ini, oleh karenanya, bermaksud untuk mengekstrak dan menjelaskan elemen sukses dari *dynamic governance* di Jawa Barat. Tujuannya ialah agar daerah-daerah lain dapat mengadopsi konsep tersebut secara jelas dan berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Selain memberi sumbangsih kepada kalangan akademisi dan peneliti mengenai kebijakan publik, hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai rujukan untuk daerah yang hendak menerapkan *dynamic governance* secara memadai, misalnya: Banten, yang sedang merintis *dynamic governance* dengan lebih menekankan pemanfaatan *internet of things, big data, dan cloud computing* (Bantenprov.go.id, 2019).

## METODE

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan desain penelitian *literature review*. Desain penelitian ini dipilih karena sangat efektif untuk menjangkau data empiris dari berbagai sumber-sumber sekunder (EPPI-Centre, 2006; Snyder, 2019). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif mengikuti langkah-langkah analisis data menurut Miles et al. (2014), yang meliputi *data condensation, data display, dan conclusion drawing/verification*.

Agar keabsahan data terjamin, triangulasi sumber dilakukan selama penelitian berlangsung. Demikianlah validitas/keabsahan data di dalam penelitian ini dicek melalui pencocokan tiga atau lebih sumber (triangulasi). Tahap ini diperlukan agar data yang didapatkan benar-benar sahih sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain bersifat klarifikatif, langkah ini dipakai karena dapat mereduksi data yang tidak perlu (Emzir, 2014; Woodside, 2010). Sedikitnya ada empat bentuk dasar triangulasi yang diusulkan Denzin (1978), tapi penelitian ini hanya menggunakan satu di antaranya, yaitu triangulasi data (informan/sumber). Data yang dianggap sah adalah data yang mempunyai kemiripan atau kesamaan (saling menguatkan) antara suatu sumber dengan sumber-sumber yang lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas-tugas pembuat kebijakan dalam desain *dynamic governance* adalah terus-menerus berpikir ke depan untuk melihat perubahan dalam lingkungan (*thinking ahead*), berpikir lagi untuk merefleksikan apa yang sedang mereka lakukan (*thinking again*), dan berpikir ke seberang untuk belajar dari orang lain (*thinking across*). Mereka harus terus menerus memasukkan persepsi, refleksi dan pengetahuan baru ke dalam aturan, kebijakan, dan struktur agar mereka bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan (Neo & Chen, 2007). Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Pemprov Jawa Barat menjalankan tiga runtutan kapabilitas di atas dengan faktor lingkungan sebagai *grand indicator*, dan melibatkan faktor-faktor utama, yaitu kelompok orang-orang yang cakap (*able people*), cerdas dan tangkas (*agile people*). Ini dimaksudkan agar pemerintah provinsi bisa menjalankan kewajibannya sebagai

pengabdian masyarakat, yaitu memfasilitasi masyarakat untuk menyelesaikan problematika yang melingkupinya mereka (Miftakhuddin, 2018).

Penelitian ini berhasil menemukan beberapa elemen sukses dalam pelaksanaan *dynamic governance* di Jawa Barat. Temuan-temuan tersebut kemudian diulas secara tematik dalam sub-section di bawah ini, meliputi: kolaborasi pentahelix, pendanaan kreatif, *digital government*, dan Jabar *open data*.

### Kolaborasi Pentahelix

Kolaborasi *pentahelix* adalah bentuk kerjasama yang melibatkan lima aktor pembangunan, yaitu akademisi, bisnis (sektor privat), masyarakat, pemerintah (sektor publik), dan *Non-Government Organization* atau media (OCC, 2019). Bagi Pemprov Jabar, cara ini tergolong baru. Sebab, kolaborasi ini mulai dilaksanakan tahun 2018 (Anggoro, 2019). Pada 2017, sebenarnya sudah ada pola-pola yang mengindikasikan adalah kolaborasi ini, utamanya dalam dunia industri di Bandung, tetapi penelitian Muhyi et al. (2017) menunjukkan bahwa kolaborasi pentahelix yang ada tidak berjalan secara baik karena beberapa sebab, seperti kurangnya komitmen, kurangnya koordinasi, dan adanya pengaruh ancaman lingkungan global (misalnya: produk impor dari China yang menyulitkan produk lokal untuk berkembang).

Apa yang ditemukan Muhyi et al. (2017) di atas juga dikonfirmasi oleh hasil penelitian Prabantariko et al. (2018) bahwa pada tahun 2017 memang ada kesenjangan dalam persepsi antara aktor-aktor dari sektor bisnis dengan masyarakat, dan aktor-aktor akademisi dengan *Non-Government Organizations*. Namun demikian, ketika Pemprov mulai memberlakukan *dynamic governance*, berbagai kesenjangan antar aktor mulai dapat teratasi sehingga terjadi iklim kerjasama kolaboratif yang baik.

Berdasarkan pengalaman Pemprov Jabar, beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam memilih aktor untuk masuk ke dalam gugus tugas dalam *pentahelix* ialah: a) aktor yang mampu dan mau mengikuti seluruh proses perencanaan, mulai dari persiapan rencana hingga implementasi tindakan; b) aktor yang berkontribusi secara konstruktif terhadap proses; c) aktor yang memiliki jaringan di sektor terkait; dan d) aktor yang dapat mewakili beragam pemangku kepentingan yang lebih besar dari *pentahelix*. Oleh karena itu, pada prinsipnya tidak semua pihak yang berada dalam lingkaran pemerintah bisa masuk menjadi tim dalam gugusan *pentahelix*.

OCC (2019) dalam hal ini merekomendasikan tipe-tipe aktor yang sangat cocok untuk dimasukkan ke dalam *pentahelix*. Tipe-tipe tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini: 1. aktor pemerintah (sektor publik) sebaiknya memenuhi kriteria: (a) merupakan perwakilan administratif dari kota, pemerintah daerah, lembaga pemerintah nasional, dan (b) merupakan perwakilan politik dari pemerintah kota atau pemerintah daerah (dipilih untuk mewakili otoritas lokal atau regional dalam satuan tugas). 2. sektor *privat* (bisnis) sebaiknya memenuhi kriteria: (a) perwakilan dari serikat pekerja, serikat dagang, atau organisasi serupa; (b) perwakilan dari struktur koperasi. 3. organisasi non pemerintah sebaiknya memenuhi kriteria: (a) organisasi lingkungan lokal atau regional; (b) organisasi payung lingkungan nasional; (c) serikat pekerja yang mengatur ilmuwan alam (mungkin mempunyai perwakilan yang berpengetahuan luas dan relevan); (d) jika ada, organisasi lingkungan pemuda. 4. masyarakat sebaiknya memenuhi kriteria: (a) asosiasi penduduk; (b) serikat pekerja dan

organisasi lain yang mencakup banyak dan beragam warga. Ini bisa berupa serikat pekerja payung, dan / atau serikat pekerja yang berfokus pada industri yang berpengaruh; (c) organisasi antaragama. 5. akademisi memenuhi kriteria: (a) merupakan karyawan akademis atau administratif di universitas atau perguruan tinggi lokal atau regional; (b) merupakan peneliti dari pusat penelitian lokal.

### Pendanaan Kreatif

Pendanaan kreatif adalah suatu metode pembiayaan kebijakan atau tindakan pemerintah tanpa mengandalkan APBN dan APBD. Ia bisa saja terwujud dalam bentuk crowdfunding ataupun dalam bentuk lainnya (Ratha et al., 2009). Sehubungan dengan konsep tersebut, Pemprov Jawa Barat menjalankan *dynamic governance* dengan memilih lima sumber anggaran di luar APBD, yaitu Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) atau *Public-Private Partnership* (PPP), dana perbankan, dana CSR, obligasi daerah, dan dana umat (Anggoro, 2019).

Pendanaan kreatif (*creative funding*) seperti di atas memang sangat dibutuhkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, sebab mampu menciptakan peluang kolaborasi sektor publik-swasta yang akan membantu mengatasi tantangan-tantangan pemerintah daerah (Gelil, 2018). Pembiayaan kreatif, menurut *globaldevincubator.org* (2014), memiliki tiga manfaat dasar dibandingkan dengan pendekatan keuangan tradisional.

*Pertama*, ia menyebarkan modal sektor swasta baru yang signifikan. Kalaupun tidak tersebar secara merata, setidaknya akan menjadi investasi yang bersifat sosial. Meskipun tidak semua pendanaan kreatif merupakan bantuan (baik berupa bantuan langsung pemerintah atau kontribusi filantropi swasta), mekanisme yang baik seringkali menyalurkan sumber daya kepada proyek-proyek yang umumnya tidak menerima bantuan, misalnya: jaminan atau bantuan investasi untuk mendukung usaha kecil dan menengah yang mungkin kesulitan untuk mengakses modal.

*Kedua*, Pendanaan kreatif mampu mengubah aset keuangan melalui penataan dan intermediasi untuk memenuhi kebutuhan program pembangunan dengan mendistribusikan risiko, meningkatkan likuiditas, mengurangi volatilitas, dan menghindari ketidakcocokan waktu. Sebab, mekanisme pendanaan kreatif menyalurkan dana dari orang dan lembaga yang ingin melakukan investasi ke proyek-proyek yang memerlukan sumber daya lebih banyak dari apa yang bisa diberikan oleh donor dan filantropi tradisional.

*Ketiga*, pendanaan kreatif mampu mendukung pendekatan sektor publik-swasta yang kooperatif untuk meningkatkan skala operasi yang menguntungkan secara sosial yang memerlukan pengeluaran modal yang signifikan. Di banyak sektor, termasuk kesehatan, jasa keuangan, dan pertanian, perusahaan swasta dengan keahlian merancang, memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan produk baru sangat penting untuk menciptakan perubahan sosial. Mekanisme pendanaan kreatif dapat menyesuaikan insentif untuk mendorong perusahaan swasta melakukan investasi yang diperlukan untuk menciptakan produk baru dan memasuki pasar baru.

Terlepas dari berbagai manfaat di atas, pendanaan kreatif tetap merupakan komponen kecil dari keberhasilan *dynamic governance* di Jawa Barat. Sebab, Pendanaan kreatif pun bisa saja terhambat oleh pasar yang tidak efisien, yang membatasi pasokan dan mengurangi permintaan. Biaya pengembangan dan penggunaan mekanisme baru, terbatasnya partisipasi investor di

luar komunitas, dan kurangnya efektifnya *feedback loop* sejauh ini telah mencegah pembiayaan inovatif untuk mencapai potensinya (Globaldevincubator.org, 2014).

### Digital Government

Melalui konsep *digital government* (atau yang akrab dikenal sebagai *e-government*), Pemprov Jabar bermaksud untuk membuat pemerintah datang kepada masyarakat (bukan masyarakat yang datang kepada pemerintah). Opsi ini diwujudkan dengan penggantian pemprov atas pihak-pihak ketiga agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan publik secara *online* (Jabarprov.go.id, 2019a).

*E-government* menyediakan layanan yang lebih efisien bagi warga melalui portal pemerintah satu pintu (Minardi, 2018). Lebih-lebih, ia didesain agar memungkinkan lembaga publik untuk tidak hanya memberikan informasi kepada individu, tetapi juga mengintegrasikan tingkat layanan yang memungkinkan kontak langsung dengan individu atau biro tertentu dalam suatu agensi, transaksi keuangan, dan bahkan jejaring sosial (Yannoukakou & Araka, 2014). Praktik-praktik semacam inilah yang diterapkan oleh Pemprov Jawa Barat. Sebagaimana diungkapkan Irawati & Munajat (2018) dalam penelitiannya yang berfokus pada evaluasi *e-government*, bahwa Jawa Barat menjalankan pemerintahan digital dengan mengikuti kaidah yang diperkenalkan oleh Hee Joon Song (*pre-implementation*, *implementation* dan *post-implementation*). Hasil dari fase-fase tersebut menunjukkan Cimahi sebagai daerah yang mengalami pembangunan paling cepat. Sedangkan kota-kota lain masih tergolong kurang berhasil dalam menjalankan *e-government*. Bahkan di Tasikmalaya, *e-government* tidak terlaksana dengan layak. Ia memerlukan lebih banyak pembimbingan, dukungan pelayanan, dan perlindungan (Suardini et al., 2018).

### Jabar Open Data

Salah satu prioritas dalam *dynamic governance* Pemprov Jabar adalah memaksa transparansi informasi masyarakat sekaligus mempermudah aksesibilitas data melalui program pelayanan Jabar Open Data yang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Barat (Diskominfo Jabar). Gagasan atas program ini merupakan percabangan dari gagasan mengenai implementasi konsep *pentahelix* di atas. Bahwa kerjasama kolaboratif yang dilakukan perlu melibatkan NGO atau media.

Platform Jabar Open Data bisa diakses di [data.jabarprov.go.id](http://data.jabarprov.go.id) Tujuannya ialah menjamin bahwasannya semua data dapat diakses dan diperoleh secara bebas dan gampang oleh masyarakat. Melalui program ini, Jawa Barat seolah menjadi provinsi digital yang berbasis data dan teknologi. Platform ini menyediakan banyak data berdasarkan kalkulasi statistik, baik yang bersifat sektoral ataupun yang bersifat sadar yang bersumber dari sejumlah perangkat daerah, lembaga vertikal, serta beberapa sumber data lainnya (terdiri atas 312 dataset). Klasifikasi tersebut didasarkan kepada data ekonomi, data infrastruktur, data kesehatan, data kemiskinan, data lingkungan hidup, data pendidikan, bahkan data mengenai pariwisata dan kebudayaan di Jawa Barat. Di samping dataset tersebut, muatan open data juga menyediakan berbagai gambar visual data atau infografik yang menarik dan sangat mudah untuk dibaca dan dipahami (Aldinar, 2019).

Meski demikian, dalam implementasinya lebih lanjut, perlu dipertimbangkan juga kesimpulan dari penelitian Roy (2014).

Bahwasannya data terbuka memang merupakan langkah pertama yang penting. Apa yang tersisa bagi sebagian besar pemerintah untuk jalur yang berhati-hati dan evolusioner. Namun semakin berkembangnya budaya keterbukaan dan isu-isu metadata serta berbagai kontroversi menunjukkan bahwa diperlukan prisma transformasional yang lebih luas dan lebih holistik dari sekadar tata pemerintahan yang terbuka dan inovatif, yang berupaya tidak hanya memberi informasi tetapi juga memberdayakan masyarakat secara partisipatif.

### KESIMPULAN

Bagi Pemprov Jawa Barat, letak pelayanan publik ada di skala prioritas pertama, baik pelayanan administratif maupun pelayanan sosial. Karena menjalankan *dynamic governance*, maka segala bentuk pelayanan publik dilaksanakan secara kolaboratif dan mengadopsi dasar-dasar *smart city*, yaitu dinamis, akomodatif, dan solutif. Implementasinya memerlukan sedikitnya empat elemen sukses yang ditemukan dalam penelitian ini, meliputi: *pentahelix collaboration*, *creative funding*, *digital government*, dan *Jabar open data*. Kolaborasi *pentahelix* adalah bentuk kerjasama yang melibatkan lima aktor pembangunan, yaitu akademisi, bisnis (sektor privat), masyarakat, pemerintah (sektor publik), dan *Non-Government Organization* atau media. Pendanaan kreatif adalah suatu metode pembiayaan kebijakan atau tindakan pemerintah tanpa mengandalkan APBN dan APBD. *Digital government* adalah usaha pelayanan masyarakat melalui portal satu pintu untuk mendatangi pemerintah ke masyarakat, bukan masyarakat yang data ke pemerintah. Sedangkan *Jabar open data* adalah usaha untuk adalah memaksa transparansi informasi masyarakat sekaligus mempermudah aksesibilitas data melalui program pelayanan Jabar Open Data yang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Barat (Diskominfo Jabar)

Namun demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa membangun budaya birokrasi dalam *dynamic governance* tidak bisa diwujudkan dalam waktu cepat, lebih-lebih melibatkan aparat di setiap level pemerintahan. Seperti yang dikatakan Neo & Chen (2007), bahwa ada komitmen jangka panjang untuk investasi dalam membangun masing-masing elemen dan merancang hubungan yang diperlukan untuk bekerja secara keseluruhan. Oleh karena itu, elemen-elemen sukses di atas bukanlah merupakan sesuatu yang mapan; sangat memungkinkan terjadi perombakan di masa depan. Elemen *digital government*, misalnya, yang seharusnya selalu mengalami pembaharuan secara periodik karena dinamika isu-isu digital sangat fluktuatif. Inipun juga telah dikonfirmasi oleh penelitian Suhardi et al. (2015) yang membuktikan bahwa penerapan *digital government* tidak berkorelasi secara signifikan terhadap ketercapaian *good governance*. Artinya, desain *digital governance* yang sekarang sedang dijalankan sekalipun belum tentu memadai untuk kebutuhan dan perubahan lingkungan di masa depan. Demikianlah *dynamic governance* di Jawa Barat pada gilirannya juga harus dinamis dan mengalami evolusi baru suatu saat nanti, yaitu *agile governance*.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor Universitas Tanjungpura dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, atas dukungannya dalam penulisan hasil penelitian ini.

## REFERENSI

- Aldinar. (2019). Dynamic governance, kunci sukses Jabar juara lahir batin. Dara.Co.Id. <https://www.dara.co.id/dynamic-government-kunci-sukses-jabar-juara-lahir-batin.html>
- Andhika, L. R. (2017). Perbandingan konsep tata kelola pemerintah: Sound governance, dynamic governance, dan open governance. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 87–102. <https://doi.org/10.22212/jekp.v8i2.867>
- Anggoro, B. (2019). Dynamic governance membuat Jabar ngabret. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/read/detail/254020-dynamic-government-membuat-jabar-ngabret>
- Bantenprov.go.id. (2019). Wagub pastikan pemprov Banten menuju dynamic governance. *Diskominfo*. <https://diskominfo.bantenprov.go.id/post/wagub-pastikan-pemprov-banten-menuju-dynamic-governance>
- EPPI-Centre. (2006). EPPI-Centre methods for conducting systematic reviews (Issue September). Social Science Research Unit, Institute of Education, University of London.
- Farazmand, A. (2004). *Sound governance: Policy and administrative innovations*. Praeger Publishers.
- Fauzi, L. M., & Iryana, A. B. (2017). Strategi dynamic governance dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi Jawa Barat. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 13–30. <https://doi.org/10.25147/moderat.v3i3.749>
- Gelil, I. A. (2018). Innovative financing. In *Financing Sustainable Development in Arab Countries*. Arab Forum for Environment and Development.
- Gilardi, F. (2016). Four ways we can improve policy diffusion research. *State Politics and Policy Quarterly*, 16(1), 8–21. <https://doi.org/10.1177/1532440015608761>
- Globaldevincubator.org. (2014). Innovative financing for development: Scalable business models that produce economic, social, and environmental outcomes (Issue September). [globaldevincubator.org](http://globaldevincubator.org).
- Hidayat, H. Y., Febriani, D. A., & Ravanelli, D. M. (2019). Tinjauan dyanamic governance dalam mendukung pengembangan perkampungan budaya Betawi (PBB) Setu Babakan menuju wisata halal. *Spirit Publik*, 14(2), 136–153.
- Irawati, I., & Munajat, E. (2018). Electronic government assessment in West Java Province, Indonesia. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 96(2), 365–381.
- Jabarprov.go.id. (2019a). Maladministration perception index, West Java provincial government is in the lowest second. <https://www.jabarprov.go.id/En/index.php/news/7480/2019/03/21/Maladministration-Perception-Index-West-Java-Provincial-Government-is-in-The-Lowest-Second>
- Jabarprov.go.id. (2019b). Ridwan Kamil paparkan sejumlah inovasi pemdaprov jabar di Korea Selatan. <https://www.jabarprov.go.id/index.php/news/35011/2019/11/05/Ridwan-Kamil-Paparkan-Sejumlah-Inovasi-Pemdaprov-Jabar-di-Korea-Selatan>
- Miftakhuddin, M. (2019). Dedication of Unej Mengajar to Improve the Human Resources' Quality in the Retarded Areas of Jember through a Participatory Approach [Pengabdian UNEJ Mengajar untuk Meningkatkan Kualitas SDM di Daerah Pelosok Jember Melalui Pendekatan Partisipatif]. *Proceeding of Community Development*, 2, 454–466.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publication. <https://doi.org/10.1080/0140528790010406>
- Minardi, A. (2018). E-government service in Singapore and Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 129(Icsp 2017), 273–280. <https://doi.org/10.2991/icsp-17.2018.60>
- Muhyi, H. A., Chan, A., Sukoco, I., & Herawaty, T. (2017). The penta helix collaboration model in developing centers of flagship industry in Bandung city. *Review of Integrative Business & Economics Research*, 6(1), 412–417.
- Neo, B. S., & Chen, G. (2007). *Dynamic governance: Embedding culture, capabilities and change in Singapore*. World Scientific Publishing.
- OCC. (2019). *Pentahelix guidelines* (Issue 784994). <https://pentahelix.eu/wp-content/uploads/2019/04/PentaHelix-guidelines.pdf>
- Pajri, E. H., & Asmorowati, S. (2019). The move toward dynamic governance in Indonesian public service (Case study of the dynamic capabilities of the immigration office class I Surabaya regions, in pasport service). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(2), 704–707. <https://doi.org/10.5220/0007550007040707>
- Piening, E. P. (2013). Dynamic capabilities in public organizations: A literature review and research agenda. *Public Management Review*, 15(2), 209–245. <https://doi.org/10.1080/14719037.2012.708358>
- Prabantarikso, M., Fahmi, I., Fauzi, A. M., & Nuryantono, N. (2018). Strategic collaborative model of BGAC + for sustainable housing development in Indonesia. *1st UPI International Geography Seminar 2017*, 145.
- Rahmatunnisa, M. (2019). Dialektika konsep dynamic governance. *Jurnal Academia Praja*, 2(2), 1–13. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.116>
- Ratha, D., Mohapatra, S., & Plaza, S. (2009). Beyond aid: New sources and innovative mechanisms for financing development in sub-sahara Africa. In S. Ketkar & D. Ratha (Eds.), *Innovative Financing for Development*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7685-0>
- Roy, J. (2014). Open data and open governance in Canada: A critical examination of new opportunities and old tensions. *Future Internet*, 6(3), 414–432. <https://doi.org/10.3390/fi6030414>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Suardini, D., Mariana, D., Rahmatunnisa, M., & Sumadinata, W. S. (2018). Implementation of good government governance through E-government. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(3), 478–481. <https://doi.org/10.35940/ijrte.B1062.0982S919>
- Suhardi, Sofia, A., & Andriyanto, A. (2015). Evaluating e-government and good governance correlation. *Journal of ICT Research and Applications*, 9(3), 236–262. <https://doi.org/10.5614/itbj.ict.res.appl.2015.9.3.3>
- Sururii, A., Rusli, B., Widianingsih, I., & Ismanto, S. (2019). Dynamic governance dalam implementasi program pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kota Serang. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, October, 1–6.

- Triyoga, H. (2020). Jokowi diminta terapkan konsep dynamic governance di periode kedua. Viva.Co.Id. <https://www.viva.co.id/berita/politik/1165657-jokowi-diminta-terapkan-konsep-dynamic-governance-di-periode-kedua>
- Wasistiono, S., & Anggraini, W. (2019). Three paradigms in government (good governance, dynamic governance, and agile governance). *International Journal of Kybernology*, 4(2), 79–91.
- Wirtz, B. W., & Birkmeyer, S. (2015). Open government: Origin, development, and conceptual perspectives. *International Journal of Public Administration*, 38(5), 381–396. <https://doi.org/10.1080/01900692.2014.942735>
- Yannoukakou, A., & Araka, I. (2014). Access to government information: Right to information and open government data synergy. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 147, 332–340. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.107>